

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi pilar utama hubungan antarnegara, di mana prinsip perdagangan bebas bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil, efisien, dan saling menguntungkan. Sejarah perdagangan bebas dimulai dari teori Adam Smith pada abad ke-18, yang menekankan bahwa negara harus fokus pada produksi barang yang paling efisien, kemudian diperluas oleh David Richardo pada 1817. Prinsip dasar perdagangan bebas adalah bahwa negara-negara dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan memberi izin barang dan jasa bergerak melintasi batas negara tanpa hambatan yang berlebihan, sehingga setiap negara dapat fokus memproduksi barang dimana mereka memiliki keunggulan komparatif.<sup>1</sup>

Dari prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya, prinsip ini menjadi dasar pembentukan sistem perdagangan global modern, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada 1947, yang bertujuan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk memfasilitasi aliran barang antarnegara. GATT kemudian berkembang menjadi *World Trade Organization* (WTO) pada 1995, yang mengatur aturan perdagangan bebas melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dan aturan non-diskriminasi seperti *Most-Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment*.<sup>2</sup> Prinsip

---

<sup>1</sup> “Evolusi Pemikiran Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif: Sejarah Pemikiran, Kontroversi, Dan Peluang Riset,” n.d., diakses Oktober 28, 2025, <https://sentrinov.isas.or.id/2021/materi/Presentasi-Bagus-Putu-Sentrinov-2021.pdf>.

<sup>2</sup> “WTO | Understanding the WTO - The Uruguay Round,” diakses Oktober 24, 2025, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact5\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm).

perdagangan bebas ini mendorong liberalisasi ekonomi, dengan tujuan menciptakan sistem perdagangan global yang adil, terbuka, dan berbasis aturan yang dapat menguntungkan semua negara anggota, termasuk negara-negara berkembang. Namun hal ini sering kali dihadapkan dengan hambatan yang muncul dari kebijakan domestik negara-negara maju.

Hambatan perdagangan bebas sering kali berasal dari asimetri ekonomi antarnegara, di mana negara maju memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi aturan global.<sup>3</sup> Misalnya, hambatan non-tarif dengan standar yang ketat hingga bisa membatasi akses negara berkembang ke pasar global, meskipun aturan WTO mengharuskan transparansi.<sup>4</sup> Selain itu, kuota impor dan dukungan harga minimum di sektor pertanian sering kali menciptakan distorsi pasar, dan mengurangi daya saing produk dari negara berkembang.

Uni Eropa (UE) telah lama memosisikan diri sebagai salah satu pendukung aktif sistem perdagangan bebas dalam forum internasional. Melalui berbagai pertemuan *World Trade Organization* (WTO), G20, dan kemitraan bilateral, UE dengan konsisten mempromosikan pentingnya liberalisasi perdagangan, penghapusan hambatan tarif, dan penciptaan akses pasar yang adil bagi seluruh negara.<sup>5</sup> Dalam berbagai forum internasional seperti WTO *Ministerial Conferences* dan G20 *Summits*, UE mengambil posisi aktif dalam mengkritik kebijakan subsidi

---

<sup>3</sup> *Mengenal Fair Trade: Konsep Dan Praktik Perdagangan Yang Adil – Creative HUB Fisipol UGM*, Desember 28, 2021, <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/07/09/mengenal-fair-trade-konsep-dan-praktik-perdagangan-yang-adil/>.

<sup>4</sup> Mariane Delanova, "Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G-33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism," *Jurnal Dinamika Global* 1, no. 01 (June 2016): 14–31, <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12>.

<sup>5</sup> "EU Statement in Support of Multilateral Trading System at WTO 30 Event, 10 April 2025 | EEAS," diakses Oktober 24, 2025, [https://www.eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/eu-statement-support-multilateral-trading-system-wto-30-event-10-april-2025\\_en?s=69](https://www.eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/eu-statement-support-multilateral-trading-system-wto-30-event-10-april-2025_en?s=69).

pertanian yang diterapkan oleh negara-negara berkembang. *European Commission* merespon tarif baja dan aluminium Amerika Serikat (2018-2020) sebagai “*unjustified US tariffs*” dan meluncurkan “*swift and proportionate countermeasures*” serta mengajukan komplain pada WTO pada 1 Juni 2018.<sup>6</sup> Uni Eropa juga mendukung Brazil, Australia dan Guatemala dalam mengajukan komplain terhadap India pada tahun 2019, yang tercatat dalam dokumen WTO bahwa pada tanggal 27 Februari tahun 2019, Brazil meminta konsultasi dengan India mengenai dukungan domestik yang diduga diberikan oleh India untuk mendukung produsen pertanian tebu dan gula (dukungan domestik), serta semua subsidi ekspor yang diduga diberikan India untuk gula dan tebu.<sup>7</sup>

Namun, dibalik prinsip perdagangan bebas tersebut, UE menjalankan *Common Agricultural Policy (CAP)* yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka kampanyekan. *Common Agricultural Policy (CAP)* merupakan kebijakan pertanian Uni Eropa yang dibentuk dan diterapkan pada tahun 1962 yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketahanan pangan, stabilitas pasar, kesejahteraan petani dan perlindungan sumber daya alam di wilayah Uni Eropa.<sup>8</sup> Melalui CAP, Uni Eropa memberikan subsidi dan proteksi pasar kepada sektor pertanian domestiknya. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme subsidi langsung kepada petani Eropa, pengaturan harga, pembatasan impor, dan kuota

---

<sup>6</sup>“Commission Responds to Unjustified US Steel and Aluminium Tariffs with Countermeasures,” n.d.

<sup>7</sup> “WTO | Dispute Settlement - DS579: India - Measures Concerning Sugar and Sugarcane,” diakses Oktober 24, 2025, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds579\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm).

<sup>8</sup> “CAP at a Glance - European Commission,” Oktober 21, 2025, [https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance\\_en](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_en).

produksi, serta menciptakan berbagai hambatan non-tarif yang secara efektif melindungi pasar domestik Uni Eropa dari persaingan internasional.

CAP secara signifikan memberikan subsidi dan perlindungan pasar kepada petani, khususnya melalui dana utama: *European Agricultural Guarantee Fund* (EAGF) dengan alokasi sekitar €291,1 miliar untuk pembayaran langsung dan intervensi pasar, serta *European Agricultural Fund for Rural Development* (EAFRD) yang mengalokasikan sekitar €95,5 miliar untuk pengembangan pertanian berkelanjutan dan sektor pedesaan selama periode 2021-2027.<sup>9</sup> Reformasi CAP terbaru pada tahun 2023 menekankan keberlanjutan lingkungan dan transisi hijau, tetapi elemen proteksionis seperti tarif impor dan mekanisme stabilitas pasar tetap dipertahankan, yang bertentangan dengan komitmen UE terhadap perdagangan bebas di bawah perjanjian WTO.

Kontradiksi antara perdagangan bebas Uni Eropa dengan praktik proteksionisme *Common Agricultural Policy* (CAP) sangat terlihat dalam sektor gula, menjadikan topik ini relevan untuk menganalisis inkonsistensi kebijakan perdagangan Uni Eropa. Uni Eropa masih mempertahankan tarif impor gula yang sangat tinggi, mencapai €419 per ton untuk gula putih, dan gula mentah €339 per ton.<sup>10</sup> Tarif-tarif ini berada di atas rentang harga gula dunia yang berkisar antara €300-€400 per ton.<sup>11</sup> Tarif-tarif tersebut secara efektif menambah beban besar pada impor gula dan memberikan proteksi yang signifikan bagi produsen gula Uni Eropa.

---

<sup>9</sup> “CAP Funds - European Commission,” Oktober 21, 2025, [https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds\\_en](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en).

<sup>10</sup> Grant Davies, Craig Heffernan, and Adam Bell, *Modelling the EU Cane Refining Sector after 2017*, n.d.

<sup>11</sup> Hendriyo Widi- [hendriyo.widi@kompas.com](mailto:hendriyo.widi@kompas.com), “Waswas Harga Gula Dunia dan Indonesia,” Kompas.id, March 9, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/waswas-harga-gula-dunia-dan-indonesia>.

Relevansi isu kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa dalam hubungan internasional sangat penting untuk dianalisis, dikarenakan peran *Common Agricultural Policy* (CAP) yang berdampak signifikan pada prinsip perdagangan bebas di sektor gula. *Common Agricultural Policy* (CAP) berfungsi untuk melindungi kepentingan domestik Uni Eropa melalui subsidi dan pembatasan impor yang ketat, sehingga menciptakan asimetri struktural dalam hubungan perdagangan global.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uni Eropa secara konsisten memposisikan diri sebagai promotor utama sistem perdagangan bebas dalam forum internasional, mempromosikan liberalisasi perdagangan, dan mengkritik kebijakan proteksionisme negara lain melalui platform multilateral seperti WTO dan G20. Namun, dalam praktiknya, Uni Eropa menjalankan *Common Agricultural Policy* (CAP) yang mengalokasikan sekitar €386.6 miliar untuk periode 2021-2027, memberikan subsidi masif kepada petani Eropa, dan menerapkan tarif impor tinggi yang secara efektif melindungi sektor pertanian Eropa dari kompetisi internasional. Kontradiksi ini sangat terlihat dalam sektor gula, dimana tarif impor mencapai €419 per ton untuk gula putih, dan €339 per ton untuk gula mentah. Sehingga menciptakan hambatan yang signifikan bagi ekspor gula dari negara-negara berkembang yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi gula. Kontradiksi ini tidak hanya berdampak pada perdagangan gula global, tapi juga mengikis kredibilitas Uni Eropa sebagai promotor perdagangan bebas.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, dapat ditarik pertanyaan mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) khususnya pada sektor gula?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) khususnya pada sektor gula.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Akademik**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi ilmu hubungan internasional, terutama kepada civitas departemen Ilmu Hubungan Internasional UNAND mengenai perdagangan global, yang berfokus pada kebijakan proteksionisme dalam perdagangan bebas. Temuan dari penelitian ini tidak hanya dapat menambah wawasan literatur akademik yang ada, akan tetapi juga memberikan pemahaman terkait faktor yang menyebabkan suatu negara merumuskan kebijakan proteksionisme dalam perdagangan bebas.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan Uni Eropa dalam mengevaluasi dan merancang reformasi kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) yang lebih responsif terhadap ketentuan perdagangan internasional serta keadilan bagi negara mitra dagang. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu aktor ekonomi dan pembuat kebijakan di negara eksportir gula untuk memahami dinamika kebijakan proteksionis dan menyesuaikan strategi perdagangan serta diplomasi ekonomi mereka untuk

menghadapi tantangan tersebut. Manfaat lainnya dari penelitian ini adalah untuk memperkuat dialog kerja sama bilateral atau multilateral dalam reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan global.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi yang selaras dengan topik penelitian yang bermanfaat untuk mengembangkan penelitian ini. Sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Referensi pertama merujuk kepada artikel jurnal yang ditulis oleh Olayinka Idowu Kareem yang berjudul *The Effects of the European Union Trade Policies on Africa: Evidence from Africa's Domestic and the EU Markets*. Artikel ini menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan Uni Eropa termasuk *Common Agricultural Policy* (CAP) berpengaruh terhadap ekspor dan pasar domestik negara-negara Afrika.<sup>12</sup> Kareem menjelaskan bahwa kebijakan subsidi dan regulasi ketat dari Uni Eropa sering kali menyebabkan distorsi harga dan menyulitkan produk Afrika, termasuk gula, untuk bersaing secara adil di pasar Eropa. Selain itu, artikel ini menganalisis kendala yang dialami pelaku ekspor Afrika akibat standar tinggi dan pertimbangan lingkungan yang diterapkan Uni Eropa, termasuk dalam konteks sektor gula.

Artikel ini berkontribusi dalam membantu peneliti mengetahui kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) dan aturan Uni Eropa mempengaruhi akses pasar serta daya saing eksportir Afrika Selatan. Artikel ini memberikan data dan

---

<sup>12</sup> Olayinka Idowu Kareem, "The Effects of the European Union Trade Policies on Africa: Evidence from Africa's Domestic and the EU Markets," *International Journal of Economic Policy Studies* 19, no. 1 (February 2025): 231–53, <https://doi.org/10.1007/s42495-024-00149-9>.

argumentasi aktual yang memperjelas bagaimana regulasi Eropa bisa menimbulkan ketimpangan, sehingga penelitian ini memiliki landasan yang kuat untuk membahas kontradiksi dan dampaknya pada perdagangan internasional.

Referensi kedua merujuk kepada artikel jurnal yang ditulis oleh Kamala Dawar yang berjudul *Protectionism and International Diplomacy: A Study*. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan proteksi perdagangan semakin erat dengan dinamika diplomasi internasional. Dawar menelusuri perubahan geopolitik global yang menggeser pola perdagangan dan menguatkan ekonomi nasionalisme sebagai bagian dari kebijakan luar negeri.<sup>13</sup> Studi ini menjelaskan bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan China menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat diplomasi dan strategi geopolitik.

Artikel ini berkontribusi dalam membantu peneliti memahami bahwa kebijakan proteksionisme seperti *Common Agricultural Policy (CAP)* bukan sekedar kebijakan domestik tetapi juga merupakan instrumen diplomasi dan politik luar negeri yang bisa menimbulkan dampak signifikan pada negara-negara mitra dagang. Dengan memahami dinamika diplomatik dan geopolitik yang melandasi proteksionisme, penelitian ini dapat menjelaskan mengapa Uni Eropa mempertahankan kebijakan *Common Agricultural Policy (CAP)* meskipun bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas WTO dan bagaimana hal itu berdampak pada sektor gula.

Referensi ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ian Sheldon dengan judul *The Future of Dispute Resolution in International Trade*. Artikel ini

---

<sup>13</sup> Kamala Dawar, "Protectionism and International Diplomacy" [https://sussex.figshare.com/articles/report/Protectionism\\_and\\_international\\_diplomacy/23429033?file=41142848](https://sussex.figshare.com/articles/report/Protectionism_and_international_diplomacy/23429033?file=41142848).

membahas mengenai kondisi penyelesaian sengketa perdagangan di *World Trade Organization* (WTO), khususnya menghadapi kebuntuan fungsi Badan Banding *World Trade Organization* (WTO) akibat penolakan anggota besar, termasuk Amerika Serikat. Sheldon mengevaluasi metode alternatif penyelesaian sengketa yang mulai digunakan dalam *Preferential Trade Agreements* (PTA), termasuk strategi negosiasi “*power-based bargaining*” yang menimbulkan ketidakpastian kebijakan dagang.<sup>14</sup>

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian ini adalah artikel ini memberikan kerangka teori dan analisis mengenai bagaimana sengketa perdagangan yang muncul karena kebijakan proteksionis seperti *Common Agricultural Policy* (CAP) dapat diselesaikan atau berdampak pada hubungan internasional.

Referensi keempat adalah artikel dari website resmi *European Commission* dengan judul *Common Agricultural Policy at a Glance*. Artikel ini membahas informasi inti dan penjelasan kebijakan, seperti tujuan, instrument, struktur subsidi, dan logika dasar mengapa *Common Agricultural Policy* (CAP) diterapkan sampai sekarang. Terdapat peta kebijakan, reformasi, serta latar belakang mengapa perlindungan sektor pertanian terus dipertahankan oleh Uni Eropa, termasuk di sektor gula.<sup>15</sup>

Artikel ini berkontribusi dalam membantu peneliti mengetahui gambaran sistem dan struktur *Common Agricultural Policy* (CAP) secara langsung dari sumber kebijakan. Referensi ini sangat penting untuk melatarbelakangi pemahaman mengenai mekanisme, latar belakang, serta alasan kebijakan *Common Agricultural*

---

<sup>14</sup> Ian Sheldon and Daniel Chee King Chow, “The Future of Dispute Resolution in International Trade,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5172971>.

<sup>15</sup>“CAP at a Glance - European Commission,” Oktober 24, 2025, [https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance\\_en](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_en).

*Policy* (CAP), sehingga peneliti bisa melihat *gap* antara tujuan normatif *Common Agricultural Policy* (CAP) dan realitas dampaknya pada perdagangan sektor gula.

Referensi kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kristen Hopewell dengan judul *Unravelling of the Trade Legal Order: Enforcement, Defection, and the Future of the WTO*. Artikel ini membahas tantangan dan krisis yang dihadapi sistem perdagangan multilateral, menyoroti peran dan strategi negara-negara besar dalam menghadapi lemahnya kepatuhan hukum serta munculnya proteksionisme sebagai alat politik dan diplomasi ekonomi.<sup>16</sup> Hopewell menampilkan analisis geopolitik dan ekonomi mendalam, membahas motif di balik kebijakan proteksionis Uni Eropa dan implikasinya terhadap mitra dagang dan stabilitas perdagangan global.

Artikel ini berkontribusi dalam memberikan perspektif kritis terkait aspek politik, ekonomi, dan diplomasi di balik penegakan dan pelanggaran aturan perdagangan internasional. Ini membantu memperjelas motivasi kebijakan seperti *Common Agricultural Policy* (CAP), yang tidak hanya mengenai proteksi ekonomi domestik, tetapi juga tentang strategi geopolitik Uni Eropa dalam perdagangan global.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Proteksionisme**

Dinamika hubungan internasional tidak terlepas dari ketegangan dan konflik yang terjadi antar negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh tiap negara. Kepentingan nasional tersebut dirumuskan dalam

---

<sup>16</sup> Kristen Hopewell, "Unravelling of the Trade Legal Order: Enforcement, Defection and the Crisis of the WTO Dispute Settlement System," *Review of International Political Economy* 27, no. 2 (March 2020): 258–80, <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1699145>.

kebijakan luar negeri yang meliputi keputusan, strategi, dan tujuan suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain. Menurut Jasmine Ahmed, kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri juga disebut sebagai cerminan dari kebijakan domestik negara.<sup>17</sup>

Bojang mendefinisikan kebijakan luar negeri terdiri atas tiga bagian, yaitu tujuan (*end*), cara (*ways*), dan sarana (*means*).<sup>18</sup> Pertama, tujuan (*end*) meliputi hasil yang diinginkan oleh suatu negara atau kepentingan dari interaksinya dengan negara atau aktor lainnya. Kedua, cara (*ways*) adalah strategi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, sarana (*means*) merupakan sumber daya seperti ekonomi dan militer yang digunakan dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, proteksionisme sebagai kebijakan ekonomi dapat menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri suatu negara pada bagian cara (*ways*) dan sarana (*means*). Hal ini juga termasuk kebijakan informal seperti keputusan suatu negara terkait posisinya terhadap negara lain atau kebijakan yang tidak dituliskan secara resmi dalam *White Paper*.<sup>19</sup>

Kebijakan proteksionisme dirumuskan untuk menghadapi dan mencegah proses perdagangan bebas. Proteksionisme sendiri diartikan sebagai bentuk kebijakan yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi produsen

---

<sup>17</sup> Jasmine Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-an Analyses," *Journal of Critical Reviews*, ahead of print, Januari 1, 2020, <https://doi.org/10.31838/JCR.07.02.144>.

<sup>18</sup> Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," diakses Oktober 27, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/330476527\\_The\\_Study\\_of\\_Foreign\\_Policy\\_in\\_International\\_Relations](https://www.researchgate.net/publication/330476527_The_Study_of_Foreign_Policy_in_International_Relations).

<sup>19</sup> Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- an Analyses."

dalam negeri dari persaingan dagang dari luar atau lingkup internasional. Kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mendorong industri nasional ini diimplementasikan dengan menerapkan kebijakan tarif atau *tariff barriers* (TF) dan kebijakan *Non-tariff Barriers* (NTB). Hambatan tarif diimplementasikan dengan bea masuk imbalan (*countervailing duty*), bea masuk anti dumping, dan bea masuk imbalan (*surcharge*). Sementara itu, hambatan non-tarif dapat dilihat melalui pembatasan, sistem kuota, ketentuan teknis, nilai pabean, dan peraturan kesehatan/karantina.

Dalam hal ini, proteksionisme dapat dipahami sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri, terutama apabila kebijakan tersebut digunakan sebagai strategi untuk menekan, membalas, atau mempengaruhi negara mitra. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab proteksionisme memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai motif dan kepentingan suatu negara dalam merespons kondisi eksternal. Dengan mengetahui alasan suatu negara memilih langkah proteksionis, dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada kombinasi pertimbangan domestik dan strategi internasional.

Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme menjadi penting dalam konteks kajian kebijakan luar negeri, karena kebijakan perdagangan bukan semata-mata persoalan ekonomi domestik, melainkan juga dapat mencerminkan sikap dan posisi suatu negara dalam hubungan internasional. Ketika suatu negara menerapkan pembatasan perdagangan terhadap negara lain, kebijakan tersebut sering kali tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi internal, tetapi juga untuk menyampaikan sinyal politik, menegosiasikan posisi strategis, atau merespons dinamika diplomatik tertentu.

Analisis terhadap faktor penyebab proteksionisme tidak hanya memberikan pemahaman terhadap dimensi ekonomi dari suatu kebijakan, tetapi juga mengungkap arah serta kepentingan strategis dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Proteksionisme dapat menjadi instrumen dalam merespons dinamika hubungan internasional, terutama ketika digunakan sebagai alat tekanan atau negosiasi terhadap negara lain. Dalam hal ini, pemahaman atas motif di balik kebijakan proteksionisme menjadi penting untuk menafsirkan sikap dan orientasi politik suatu negara di panggung global. Hal ini sesuai dengan faktor penyebab kebijakan proteksionisme yang dikemukakan oleh Suhail Abboushi dalam penelitiannya yang berjudul *Trade Protectionism: Reasons and Outcome*. Suhail Abboushi berpendapat bahwa terdapat lima alasan yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme suatu negara, yaitu:<sup>20</sup>

1. *National Defense*

Perlindungan terhadap industri pertahanan dalam negara dinilai penting untuk melindungi kesiapan negara menghadapi masa-masa sulit. Tapi, seiring dengan berkembangnya zaman, konsep pertahanan nasional juga semakin kompleks. Dalam tulisannya, Suhail menjelaskan bahwa perlindungan terhadap industri pertahanan seperti industri senjata dan pesawat tempur memang penting, akan tetapi agar industri tersebut tetap berjalan, maka dibutuhkan industri lain yang terlibat di dalamnya seperti industri plastik, besi, kimia, dan komputer.

2. *Balance of Payments (BoP)*

---

<sup>20</sup> Suhail Abboushi, "Trade Protectionism: Reasons and Outcomes," diakses Oktober 27, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/235283803\\_Trade\\_protectionism\\_Reasons\\_and\\_outcomes](https://www.researchgate.net/publication/235283803_Trade_protectionism_Reasons_and_outcomes).

adalah suatu catatan yang merangkum semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks teori proteksionisme, BoP memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dengan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang domestik. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menetapkan tarif agar permintaan produk dari luar negeri menurun dan pemerintah dapat mendorong produsen dalam negeri untuk menggantikan produk tersebut. Selain itu, kebijakan proteksionisme juga mendukung negara untuk melakukan ekspor untuk meraih surplus pada neraca perdagangan.

### 3. *Employment*

Tingginya dominasi produk impor di suatu negara dapat menyebabkan industri lokal berkurang karena permintaannya yang terus menurun. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan di negara tersebut yang kemudian berkembang menjadi masalah pengangguran karena industri lokal yang semakin berkurang. Proteksionisme dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Dengan mengurangi jumlah barang impor, perusahaan domestik mungkin akan mengalami peningkatan penjualan, yang dapat menghasilkan peningkatan produksi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

### 4. *Infant Industries*

*Infant Industries* merupakan argumen klasik proteksionisme, *infant industry* belum memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi maupun keterampilan manufaktur layaknya industri besar sehingga peran pemerintah diperlukan untuk melindunginya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah maka akan sulit

bersaing dengan industri yang lebih besar pada pasar global. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi produk-produk domestik dari persaingan industri yang lebih besar dari negara lain dengan cara membatasi impor barang dari negara-negara yang memiliki industri maju tersebut.

#### 5. *Level Playing Field*

Pemerintah memberlakukan langkah-langkah proteksi terhadap bisnis asing jika pemerintah mereka melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri mereka. Tujuannya adalah untuk menggunakan efek timbal balik dan menekan pemerintah asing agar menurunkan atau menghapus langkah-langkah proteksi mereka. Argumen ini juga dikenal sebagai kebijakan *fair trade* dan dipraktikkan oleh pemerintah di seluruh dunia yang mempengaruhi banyak industri. Selain itu, sering kali menghasilkan undang-undang yang kuat yang mengamankan penggunaan perlindungan *quid pro quo*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti memilih menggunakan konsep proteksionisme untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Uni Eropa menerapkan kebijakan protektif melalui *Common Agricultural Policy (CAP)* terhadap ekspor gula.

Peneliti mengadopsi lima poin yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme menurut Suhail Abboushi, yaitu *National defense, Balance of payments, Employment, Infant industries*, dan *Level playing field*, sebagai kerangka analisis untuk melihat alasan-alasan di balik kebijakan *Common Agricultural Policy (CAP)* tersebut. Dalam konteks *Common Agricultural Policy (CAP)*, kelima faktor ini menjelaskan mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan kebijakan protektif yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pertanian (*National*

*defense*), melindungi neraca perdagangan sektor pertanian agar tetap stabil (*Balance of payments*), menjaga lapangan kerja bagi petani lokal (*Employment*), mendukung perkembangan industri gula yang masih memerlukan perlindungan (*Infant industries*), serta memastikan perlakuan yang adil bagi produsen domestik agar tidak dirugikan oleh persaingan global yang tidak seimbang (*Level playing field*). Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami kontradiksi antara kebijakan proteksionis *Common Agricultural Policy* (CAP) dan prinsip perdagangan bebas yang ditegakkan oleh Uni Eropa, terutama dalam konteks pembatasan akses pasar sektor gula.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Dalam studi hubungan internasional, metodologi merupakan sebuah prinsip, proses, dan prosedur, yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu isu atau fenomena, dalam hubungan internasional melalui prosedur logika dan konseptualisasi, sebagai dasar proses penelitian sosial. Penerapan metodologi dalam penelitian berfungsi agar peneliti lebih kompeten dalam melaksanakan penelitian sendiri, serta lebih analitis dalam menganalisa hasil penelitian orang lain. Metodologi dapat membantu proses identifikasi perumusan masalah, konsep, dan teori yang kurang tepat dengan lebih cepat.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang menggali dan memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam terhadap

data yang bersifat deskriptif.<sup>21</sup> Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan laman berita yang berisi pernyataan resmi suatu negara atau aktor lainnya. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksud adalah Uni Eropa yang mengeluarkan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) yang berkaitan dengan proteksionisme pada sektor gula.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian berjenis deskriptif analisis bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu isu atau fenomena menggunakan data-data yang didapat dari majalah berita, laporan resmi, jurnal, dan artikel penelitian ilmiah. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor yang menyebabkan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP), meskipun Uni Eropa adalah salah satu pendukung aktif sistem perdagangan bebas dalam forum internasional.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah dari tahun 2020-2024, karena periode tersebut merupakan masa implementasi dan reformasi kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) terbaru yang relevan dengan isu proteksionisme sektor gula. Secara geografis, penelitian berfokus pada wilayah Uni Eropa sebagai pembuat kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP). Secara substantif, penelitian membatasi analisis pada kebijakan CAP terkait subsidi, kuota, dan perlindungan pasar pada sektor gula serta hubungannya dengan prinsip

---

<sup>21</sup> Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (John Wiley & Sons, 2015).

perdagangan bebas. Sektor gula dipilih sebagai fokus analisis dalam penelitian ini karena sektor gula merupakan salah satu komoditas yang paling terdampak oleh kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa. Reformasi *Common Agricultural Policy* (CAP) terbaru (2021-2027) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023 masih mempertahankan perlindungan ketat terhadap sektor gula melalui subsidi, kuota produksi, dan tarif impor tinggi.<sup>22</sup>

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan, dan sering disebut sebagai variabel dependen.<sup>23</sup> Berdasarkan penelitian ini, unit analisis nya adalah Uni Eropa. Fokus utama adalah bagaimana Uni Eropa merancang kebijakan tersebut, mengimplementasikan, dan menyusun strategi proteksionis apa yang akan diaplikasikan untuk melindungi pasar gula Uni Eropa serta dampaknya pada perdagangan internasional.

Sedangkan, unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya Adalah kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP). Dalam konteks ini, unit ini dianggap sebagai pihak yang menentukan kebijakan, mempertahankan mekanisme proteksi, dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan politik domestik dan tekanan internasional.

---

<sup>22</sup> “CAP at a Glance - European Commission,” Oktober 24, 2025.

<sup>23</sup> “Ilmu Hubungan Internasional - Mohtar Mas’oed.,” diakses Oktober 27, 2025, <https://idoc.pub/documents/ilmu-hubungan-internasional-mohtar-masoedpdf-d47e1gmd5yn2>.

<sup>24</sup> “Ilmu Hubungan Internasional - Mohtar Mas’oed.”

Tingkat analisis atau level analisis atau level analisis didefinisikan sebagai acuan posisi dari unit yang akan diteliti.<sup>25</sup> Menurut Mochtar Mas' oed, tingkat atau level analisis terdiri dari lima, yaitu: pertama, perilaku individu atau tokoh individu yang mempengaruhi suatu keputusan melalui persepsi, kepribadian, atau tingkah laku, seperti presiden dan kepala pemerintahan. Kedua, perilaku kelompok di dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional. Ketiga, perilaku negarabangsa atau interaksi dan dinamika proses pembuatan keputusan suatu negara di dalam hubungan internasional. Keempat, perilaku pengelompokan negara-negara atau regional atau interaksi antar-negara yang berupa seperti aliansi, persekutuan perdagangan, dan lain-lain. Kelima, perilaku sistem internasional atau suatu fenomena atau dinamika perilaku aktor di dalam sistem internasional, seperti hukum internasional.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan tingkat analisis atau level analisis di tingkat perilaku negara dengan model hubungan unit analisis dan eksplanasi penelitian korelasional karena unit analisis dan unit eksplanasi berada di tingkat yang sama, yaitu di tingkat negara. Tingkat analisis ini mencakup Uni Eropa sebagai kawasan ekonomi politik yang menjadi pusat pengambilan keputusan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP). Melalui tingkat analisis ini, penelitian dapat memahami bagaimana keputusan di tingkat negara atau kawasan menghasilkan konsekuensi dalam hubungan perdagangan internasional dan penciptaan ketidakseimbangan pasar, terutama pada sektor gula antara Uni Eropa dan pasar internasional.

---

<sup>25</sup> “Ilmu Hubungan Internasional - Mohtar Mas' oed.”

<sup>26</sup> “Ilmu Hubungan Internasional - Mohtar Mas' oed.”

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Menurut Sugiono, data primer adalah data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>27</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data primer yaitu, *website* resmi pemerintahan, arsip resmi pemerintahan, *channel Youtube* resmi pemerintahan, serta media sosial resmi pemerintahan dan pemimpin pemerintahan di Uni Eropa. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka (*library research*) seperti buku, jurnal, buku dan jurnal online.

Data-data primer yang penulis gunakan menggunakan data primer yang bersumber dari *website* resmi seperti situs milik *European Commision*, UNCTAD, WTO, FAOSTAT, OECD. Serta berita video daring dari *channel Youtube* resmi seperti *European Parliament*.

Data-data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri dari buku, jurnal, artikel jurnal, dan berita daring yang diambil dari situs *website* terpercaya. Penulis menggunakan data dari berita daring terpercaya seperti KOMPAS. Buku yang penulis gunakan seperti buku *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* tahun 1990 oleh Mochtar Mas' oed, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* tahun 1994 oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Selain itu, juga terdapat beberapa jurnal dan artikel jurnal yang penulis

---

<sup>27</sup> Toto Sugiarto Unp, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Prof. Sugiono*, n.d., diakses Oktober 27, 2025, [https://www.academia.edu/118903676/Metode\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_Kualitatif\\_dan\\_R\\_and\\_D\\_Prof\\_Sugiono](https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono).

gunakan, seperti artikel yang ditulis oleh Olayinka Idowu Kareem yang berjudul *The Effects of the European Union Trade Policies on Africa: Evidence from Africa's Domestic and the EU Markets*, Kamala Dawar, *Protectionism and International Diplomacy: A Study*. Ian Sheldon, *The Future of Dispute Resolution in International Trade*. Kristen Hopewell, *Unravelling of the Trade Legal Order: Enforcement, Defection, and the Future of the WTO*.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Teknik analisis tersebut terdiri dari tiga tahapan, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan seleksi, pengurangan, penyederhanaan, dan transformasi data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, maka akan dilakukan pengurangan terhadap data yang tidak relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa, *Common Agricultural Policy* (CAP) terhadap ekspor gula, sehingga memudahkan proses analisis terhadap proses berikutnya. Data yang telah dikumpulkan dan disederhanakan akan disusun dalam bentuk narasi yang kemudian menggambarkan temuan utama dalam penelitian ini, yaitu faktor yang menyebabkan Uni Eropa mengeluarkan *Common Agricultural Policy* (CAP) terhadap sektor gula.

#### 2. Penyajian Data

---

<sup>28</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (SAGE, 2014).

Dalam tahapan ini, dilakukan proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang dipilih, yaitu proteksionisme. Data yang sebelumnya telah melalui proses reduksi akan disampaikan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif agar dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis akan menyampaikan data hasil temuan, yaitu ekspor gula yang masuk ke Uni Eropa sejak tahun 2020-2024 berupa tabel, grafik, dan diagram dalam bentuk teks.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan terhadap data yang diinterpretasikan dan dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, tahap penarikan kesimpulan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor yang menyebabkan Uni Eropa mengeluarkan *Common Agricultural Policy* (CAP) terhadap sektor gula.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi Pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan Tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Uni Eropa dan Liberalisasi Perdagangan**

Bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan Uni Eropa, prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan, serta peran Uni Eropa dalam sistem perdagangan internasional dan mekanisme perjanjian perdagangan bebas yang

diterapkan oleh Uni Eropa. Serta menjelaskan bagaimana kebijakan Uni Eropa serta dinamika liberalisasi perdagangannya membentuk posisi Uni Eropa sebagai kekuatan besar dalam perdagangan global.

### **BAB III : *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa, meliputi sejarah pembentukan *Common Agricultural Policy* (CAP), tujuan utama, alat-alat kebijakan seperti subsidi, kuota, dan standar produk, serta berbagai reformasi yang diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) dengan tuntutan perdagangan global. Penjelasan pada bab ini digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Uni Eropa dalam mengatur dan melindungi sektor pertanian domestiknya dan dapat dijadikan pendukung untuk penjelasan pada bab berikutnya mengenai faktor-faktor strategis yang melatarbelakangi penerapan kebijakan CAP tersebut, khususnya pada sektor gula.

### **BAB IV : Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa pada Sektor Gula**

Pada bab ini akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan Uni Eropa mempertahankan *Common Agricultural Policy* (CAP) meskipun berdampak pada sektor gula. Bab ini merupakan bagian pengujian terhadap teori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis, yaitu teori proteksionisme. Dan akan menjelaskan mengenai alasan yang melatarbelakangi kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) Uni Eropa pada Sektor Gula dengan menggunakan konsep *Trade Protectionism* yang dikembangkan oleh Suhail abboushi, yang dimana terdapat lima faktor yang menyebabkan suatu negara mengambil kebijakan

proteksionisme. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pertama, *National Defense*, *Balance of Payment (BoP)*, *Employment*, *Infant Industries*, dan *Level Playing Fields*

## **BAB V : Kesimpulan**

Bagian ini berisi tentang rangkuman pembahasan dari penelitian ini beserta saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya dan pihak yang terlibat dalam melanjutkan atau mengembangkan penelitian agar lebih baik.

